



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Balikpapan**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan, terutama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Balikpapan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Penyusunan dokumen ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap capaian kinerja periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan daerah yang relevan. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui sumbangan pikiran, data, maupun masukan selama proses penyusunan berlangsung. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Balikpapan, September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Balikpapan


SUTADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	4
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	33
3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	33
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	35
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	37
4.2 Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan	40
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	97
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	98
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	100
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	100
5.3 Rencana Tindak Lanjut	101

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun sosial politik. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas politik, kerukunan antar umat beragama, ketahanan bangsa, serta ketertiban masyarakat. Dinamika pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat juga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, konflik horizontal, maupun permasalahan kebangsaan lainnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dituntut untuk hadir sebagai fasilitator, mediator, dan katalisator dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menciptakan kondisi daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berperan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan, serta pencegahan potensi konflik sosial di daerah.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan. Dengan demikian, dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan, menyelaraskan program dan kegiatan, serta mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 6) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.
- 7) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dimaksudkan sebagai:

- 1) Pedoman arah kebijakan, strategi, dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka menengah lima tahunan.
- 2) Acuan bagi perumusan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.
- 3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terukur, sistematis, dan akuntabel.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan bertujuan untuk:

- 1) Menjabarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan ke dalam kebijakan operasional perangkat daerah.
- 2) Menentukan arah pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial, pembinaan ideologi Pancasila, serta penguatan wawasan kebangsaan.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 4) Mendorong terciptanya stabilitas politik, kondusivitas daerah, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan kebangsaan.
- 5) Menjadi dasar evaluasi kinerja secara periodik serta bahan dalam menyusun kebijakan di periode perencanaan berikutnya.

1.1 Sistematika Penulisan Renstra

- **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.
- **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, menguraikan tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pelayanan.
- **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, memuat identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, analisis lingkungan strategis, serta penentuan isu strategis perangkat daerah.
- **Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**, yang menjabarkan visi, misi kepala daerah dalam RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, memuat strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan perangkat daerah.
- **Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja**, berisi uraian program dan kegiatan beserta indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
- **Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah**, yang memuat indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja sasaran (IKS), dan indikator kinerja program dan kegiatan (IKP/K).
- **Bab VIII Penutup**, berisi kesimpulan umum serta harapan dan komitmen pelaksanaan Renstra.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki fungsi dan tugas yaitu

Bagian Kesatu Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;

- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat;
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (tugas merumuskan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas Badan di bidang:

- a. ideologi;
- b. wawasan kebangsaan;
- c. bela negara;
- d. karakter bangsa;
- e. pembauran kebangsaan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. sejarah kebangsaan;
- h. ketahanan ekonomi;
- i. sosial;
- j. budaya;
- k. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;

- l. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini;
- m. fasilitasi kerjasama intelijen;
- n. fasilitasi pemantauan orang asing;
- o. fasilitasi tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
- p. fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- q. fasilitasi kewaspadaan perbatasan antar negara; dan
- r. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang:

- a. pendidikan politik;
- b. etika budaya politik;
- c. peningkatan demokrasi;
- d. fasilitasi kelembagaan pemerintahan;
- e. fasilitasi perwakilan dan partai politik;
- f. fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah;
- g. fasilitasi pemantauan situasi politik;
- h. pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- i. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- j. evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; dan
- k. pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

- organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud.

Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan per 30 September 2025 memiliki sumber daya manusia sebanyak 31 orang, terdiri dari PNS sebanyak 20 orang, PPPK 7 orang, dan Non PNS 4 orang yang secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Per 30 September 2025

Jabatan	Golongan				Sub	Pendidikan						Sub	Jenis Kelamin	
	IV	III	II	I	Total	S-2	S-1/ D-4	D3	SMA	SMP	SD	Total	L	P
Kepala Badan	1				1	1						1	1	
Sekretaris Badan	1				1	1						1	1	
Kepala Bidang		2			2	2						2	1	1
Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian	1	4			5	1	3	1				5	3	2
Pelaksana		8	3		11		4	2	5			11	6	5
PPPK					7		1	1	4	1		7	3	4
Jumlah PNS/PPPK	3	14	3	0	27	5	8	4	9	1		27		
Non PNS					4		2		2			4	1	3
Total SDM PNS/PPPK+ Non PNS	31 Orang													

Sumber : Badan Kesbangpol

a. Sarana dan Prasarana

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : BADAN KESBANG DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : BADAN KESBANG DAN POLITIK U P B : BADAN KESBANG DAN POLITIK

NOMOR	SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					Barang	Harga
1	4	5	8	9	10	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	Pembelian	1990	1300	Baik	1	130.000.000,00
2	Portable Generating Set	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	1	4.250.000,00
3	Portable Generating Set	Honda Exell / SF7000 XE	Pembelian	2009	Besar	Baik	1	15.000.000,00
4	Station Wagon	-	Pembelian	1994		Rusak Berat	1	50.000.000,00
5	Station Wagon	Toyota	Pembelian	2001		Kurang Baik	1	80.000.000,00
6	Station Wagon	Toyota / Kijang	Pembelian	2004		Kurang Baik	1	100.000.000,00
7	Station Wagon	Suzuki / GC415V APV STD	Pembelian	2009	1.493 CC	Baik	1	116.000.000,00
8	Station Wagon	Toyota /	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	177.672.090,00
9	Station Wagon	Avanza 1500 S Toyota New Rush 1.5 S A/T GR Sport VIN 2021	Pembelian	2021		Baik	1	246.400.000,00
10	Station Wagon	Toyota New Rush 1.5 S A/T GR Sport VIN 2021	Pembelian	2021		Baik	1	246.400.000,00
11	Station Wagon	Toyota New Rush 1.5 S A/T GR Sport VIN 2021	Pembelian	2021		Baik	1	246.400.000,00
12	Pick Up	New CarryPick up WD AC PS / manual	Pembelian	2023		Baik	1	170.900.000,00
13	Sepeda Motor	-	Pembelian	1996		Rusak Berat	2	8.000.000,00
14	Sepeda Motor	Suzuki /	Pembelian	1999	100 CC	Kurang Baik	1	4.500.000,00
15	Sepeda Motor	Tornado Suzuki /	Pembelian	2003	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00
16	Sepeda Motor	FD110 XCSD Suzuki / FD110 XCSD	Pembelian	2003	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00

17	Sepeda Motor	Suzuki / FD110XCSD	Pembelian	2006	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00
18	Sepeda Motor	Suzuki / FD110XCSD	Pembelian	2006	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00
19	Sepeda Motor	-	Pembelian	2008		Rusak Berat	2	28.020.000,00
20	Sepeda Motor	Kanzen / RT 110 Taurus	Pembelian	2008	110 CC	Kurang Baik	1	11.000.000,00
21	Sepeda Motor	Yamaha / Vega ZR	Pembelian	2009	115 cc	Kurang Baik	1	4.050.000,00
22	Sepeda Motor	Kanzen KT. 110	Pembelian	2009		Rusak Berat	1	11.000.000,00
23	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	Pembelian	2010	115 cc	Baik	1	12.965.700,00
24	Sepeda Motor	kawasaki / kawasaki KLX 150 S	Pembelian	2023		Baik	1	33.455.000,00
25	Sepeda Motor	kawasaki / kawasaki KLX 150 S	Pembelian	2023		Baik	1	33.455.000,00
26	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
27	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
28	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
29	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
30	Sepeda Motor	Honda / Vario 160 CBS	Pembelian	2024		Baik	1	28.580.000,00
31	Sepeda Motor	Honda / Vario 160 CBS	Pembelian	2024		Baik	1	28.580.000,00
32	Gerobak Dorong	-	Pembelian	2015		Baik	1	425.000,00
33	Gergaji Chain Saw	MS 180	Pembelian	2022		Baik	1	4.950.000,00
34	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	1.275.000,00
35	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	OLIMPIA	Pembelian	2016		Baik	1	2.289.500,00
36	mesin ketik lainnya (dst)	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	1.275.000,00
37	Mesin Fotocopy Folio	Fujifilm Apeos / 2560 CPS	Pembelian	2024		Baik	1	92.500.000,00
38	Lemari Besi/Metal	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	2	2.000.000,00
39	Lemari Besi/Metal	Lion / 2 Pintu	Pembelian	2012		Baik	2	7.260.000,00
40	Lemari Besi/Metal	-	Pembelian	2013		Baik	2	5.100.000,00
41	Lemari Besi/Metal	VIP / DUA PINTU	Pembelian	2015		Baik	2	5.800.000,00
42	Lemari Kayu	-	Pembelian	2001		Rusak Berat	1	6.120.000,00
43	Lemari Kayu	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	2.550.000,00
44	Lemari Kayu	- / bahan kayu	Pembelian	2019		Baik	1	5.200.000,00
45	Lemari Kayu	- / Bahan Kayu	Pembelian	2019		Baik	1	4.150.000,00
46	Lemari Kayu	costum	Pembelian	2024		Baik	1	11.850.000,00
47	Rak Besi	custem	Pembelian	2023		Baik	5	18.037.500,00
48	Rak Besi	Rak Frey 5 Shelves	Pembelian	2024		Baik	1	850.000,00
49	Rak Kayu	Lokal / -	Pembelian	2001	2x2	Kurang Baik	1	850.000,00
50	Rak Kayu	Activ / -	Pembelian	2009	-	Baik	2	819.000,00
51	Rak Kayu	-	Pembelian	2016		Baik	4	5.904.500,00
52	Rak Kayu	- / Standing	Pembelian	2019		Baik	1	2.250.000,00

53	Filing Cabinet Besi	-	Pembelian	2000		Rusak Berat	1	1.530.000,00
54	Filing Cabinet Besi	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	3.060.000,00
55	Filing Cabinet Besi	Lion / 3 pintu	Pembelian	2009	-	Baik	1	2.691.000,00
56	Filing Cabinet Besi	VIP / 4 pintu	Pembelian	2010	-	Baik	2	5.000.000,00
57	Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet / LEMARI BESI	Pembelian	2015		Baik	1	3.500.000,00
58	Filing Cabinet Besi	VIP / bahan besi	Pembelian	2019		Baik	1	4.200.000,00
59	Brandkas	President / 20"	Pembelian	2000	-	Kurang Baik	1	6.375.000,00
60	Brandkas	INDACHI / BG - 120 000059	Pembelian	2015	49 x 58 CM	Baik	1	9.720.000,00
61	Locker	custem	Pembelian	2023		Baik	1	6.937.500,00
62	CCTV - Camera Control Television System	HIK Vision / Outdoor Infra red	Pembelian	2019		Baik	2	1.100.000,00
63	CCTV - Camera Control Television System	HIK Vision / Indoor Infra red	Pembelian	2019		Baik	5	2.500.000,00
64	CCTV - Camera Control Television System	HIK Vision / PTZ Motorik	Pembelian	2019		Baik	1	6.000.000,00
65	CCTV - Camera Control Television System	HIK / DVR 8ch	Pembelian	2019		Baik	1	7.350.000,00
66	CCTV - Camera Control Television System	PTZ-WIFI / kamera hd 2 ttk	Pembelian	2024		Baik	2	4.170.000,00
67	White Board	V-TEC / -	Pembelian	2011	-	Baik	10	5.750.000,00
68	White Board	-	Pembelian	2015		Baik	8	28.000.000,00
69	Alat Penghancur Kertas	GEMET 1000S	Pembelian	2011		Baik	1	1.500.000,00
70	Alat Penghancur Kertas	Kozure KS-9600c	Pembelian	2024		Baik	1	7.500.000,00
71	Mesin Absensi	SOLUTION/X30 2 / 1 PAKET KOMPUTER DAN MESIN	Pembelian	2013		Baik	1	18.700.000,00
72	Mesin Absensi	solution x802 / infrared	Pembelian	2021		Baik	1	14.960.000,00
73	LCD Projector/Infocus	Epson EB X-51 / Wifi	Pembelian	2021		Baik	1	11.319.000,00
74	Papan Pengumuman	custem	Pembelian	2024		Baik	1	32.412.000,00
75	Alat Kantor Lainnya	-	Pembelian	2016		Baik	2	8.856.750,00
76	Meja Kerja Kayu	- / blocktick 18 mm cat duco silver	Pembelian	2021		Baik	1	3.168.000,00
77	Meja Kerja Kayu	- / blocktick 18 mm cat duco silver	Pembelian	2021		Baik	3	9.504.000,00
78	Meja Kerja Kayu	custem	Pembelian	2023		Baik	5	8.325.000,00
79	Meja Kerja Kayu	costum	Pembelian	2024		Baik	1	15.400.000,00
80	Meja Rapat	Lokal / -	Pembelian	2008	Panjang	Baik	1	7.020.000,00
81	Meja Rapat	- / bahan kayu	Pembelian	2019		Baik	1	12.750.000,00
82	Meja Resepsionis	Custem	Pembelian	2024		Baik	1	8.500.000,00
83	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	1994		Rusak Berat	1	800.000,00
84	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	1998		Rusak Berat	1	3.570.000,00
85	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	2001		Rusak Berat	1	400.000,00

86	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	1	3.060.000,00
87	Meja 1/2 Biro	Lokal / -	Pembelian	2009	-	Baik	2	2.500.000,00
88	Kursi Rapat	bufalo	Pembelian	2023		Baik	21	10.489.500,00
89	Kursi Tamu	-	Pembelian	2000		Rusak Berat	1	680.000,00
90	Kursi Tamu	-	Pembelian	2016		Baik	4	1.997.892,00
91	Kursi Tamu	Custom	Pembelian	2022		Baik	1	7.150.000,00
92	Kursi Putar	-	Pembelian	2001		Rusak Berat	2	765.000,00
93	Kursi Putar	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	4.207.500,00
94	Kursi Putar	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	2	2.295.000,00
95	Kursi Putar	frontline	Pembelian	2015		Baik	1	750.000,00
96	Kursi Putar	frontline	Pembelian	2015		Baik	2	1.500.000,00
97	Kursi Putar	frontline	Pembelian	2015		Baik	1	750.000,00
98	Kursi Putar	-	Pembelian	2016		Baik	5	7.983.125,00
99	Kursi Lipat	-	Pembelian	2016		Baik	35	12.230.750,00
100	Kursi Lipat	Chitose / lipat	Pembelian	2019		Baik	20	13.000.000,00
101	Meja Komputer	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	1	552.500,00
102	Sofa	BIG	Pembelian	2021		Baik	1	8.800.000,00
103	Sofa	TOP/COKLAT / SHAPE PREMIUM QUALITY Desian Modern lynden set Sofa / set	Pembelian	2024		Baik	2	31.890.000,00
104	Jam Elektronik	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	2	200.000,00
105	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	- / -	Pembelian	2015		Baik	1	350.000,00
106	Mesin Pemotong Rumput	SHIROZI	Pembelian	2015		Baik	1	2.400.000,00
107	Alat Pembersih lainnya	hitachi / economic filter	Pembelian	2023		Baik	1	2.220.000,00
108	Lemari Es	Sanyo /	Pembelian	2006	Mini	Kurang Baik	1	2.550.000,00
109	Lemari Es	Portable Sharp / 1 pintu refrigerator / lemon	Pembelian	2010	-	Baik	1	2.500.000,00
110	Lemari Es	sharp	Pembelian	2022		Baik	1	3.520.000,00
111	A.C. Window	SHARP 1 PK / AH - A5MCY	Pembelian	2015		Baik	5	20.500.000,00
112	A.C. Split	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	2	3.910.000,00
113	A.C. Split	-	Pembelian	2007		Rusak Berat	1	1.955.000,00
114	A.C. Split	Changhong / Split	Pembelian	2011	2 PK	Baik	1	6.000.000,00
115	A.C. Split	Changhong / Split	Pembelian	2011	2 PK	Baik	1	6.000.000,00
116	A.C. Split	PANASONIC / CS-YC9NKJ	Pembelian	2015		Baik	2	8.400.000,00
117	A.C. Split	SAMSUNG	Pembelian	2016		Baik	2	9.492.990,00
118	A.C. Split	Panasonic / Wall Mounted Split	Pembelian	2020		Baik	4	33.880.000,00
119	A.C. Split	panasonic / split 2 pk	Pembelian	2021		Baik	2	17.820.000,00
120	A.C. Split	Panasonic / 1 PK	Pembelian	2023		Baik	1	5.400.000,00
121	A.C. Split	Panasonic / split	Pembelian	2024		Baik	1	7.750.000,00
122	Kipas Angin	MASPION /	Pembelian	2013		Baik	2	960.000,00

123	Kipas Angin	WALL FAN UCHIDA / CF-240	Pembelian	2013		Baik	1	480.000,00
124	Kompas Gas (Alat Dapur)	RINNAI / RI-522C	Pembelian	2013		Baik	1	650.000,00
125	Treng Air/Tandon Air	GENTONG AIR	Pembelian	2013		Baik	1	400.000,00
126	Alat Dapur lainnya	IGLO	Pembelian	2013		Baik	1	382.000,00
127	Televisi	-	Pembelian	2004		Rusak Berat	1	935.000,00
128	Televisi	Sony / Multy System Stereo	Pembelian	2005	29 inch	Kurang Baik	1	3.400.000,00
129	Televisi	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	935.000,00
130	Televisi	LG /	Pembelian	2006	21 inch	Kurang Baik	1	1.785.000,00
131	Televisi	Color/flatron Sharp / -	Pembelian	2007	21 inch	Kurang Baik	1	1.785.000,00
132	Televisi	Samsung / LED	Pembelian	2015	32 "	Baik	1	4.210.000,00
133	Televisi	TOSHIBA / LED	Pembelian	2015	21"	Baik	1	3.200.000,00
134	Televisi	LG / LED	Pembelian	2019		Baik	1	2.800.000,00
135	Televisi	samsung / smart TV	Pembelian	2021		Baik	1	12.188.000,00
136	Televisi	Samsung / Smart TV	Pembelian	2022		Baik	2	13.320.000,00
137	Televisi	samsung	Pembelian	2023		Baik	1	10.323.000,00
138	Televisi	samsung / plus bracket	Pembelian	2023		Baik	1	144.133.500,00
139	Televisi	samsung	Pembelian	2023		Baik	1	17.038.500,00
140	Sound System	Soundrenaline / SP-150	Pembelian	2009	-	Baik	1	10.000.000,00
141	Sound System	Yamaha VSA	Pembelian	2024		Baik	1	28.300.000,00
142	Wireless	-	Pembelian	2013		Baik	1	1.738.000,00
143	Microphone	Soundbest	Pembelian	2023		Baik	8	6.993.000,00
144	Unit Power Supply	PS / PS-30	Pembelian	2019		Baik	1	850.000,00
145	Stabilisator	ICA CE 1200 / UPS S/N 1B1D21401694	Pembelian	2014		Baik	3	4.737.727,00
146	Camera Video	Canon EDS70D + Lens / EDS 70D / DS 126411	Pembelian	2014		Baik	1	15.250.000,00
147	Camera film	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	1	3.400.000,00
148	Camera film	Sony / W290	Pembelian	2009	-	Baik	2	9.400.000,00
149	Alat Hiasan	-	Pembelian	2013		Baik	1	575.000,00
150	Tiang Bendera	custem / kayu jati	Pembelian	2024		Baik	2	3.700.000,00
151	Tangga Aluminium	-	Pembelian	2012		Baik	1	3.500.000,00
152	Dispenser	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	300.000,00
153	Dispenser	-	Pembelian	2007		Rusak Berat	2	1.350.000,00
154	Dispenser	SANKEN	Pembelian	2013		Baik	2	1.000.000,00
155	Dispenser	MIYAKO / HOT & COOL	Pembelian	2013		Baik	1	500.000,00
156	Dispenser	sanken / Hot and cool	Pembelian	2021		Baik	2	8.536.440,00

157	Dispenser	sanken / 220 v	Pembelian	2021		Baik	1	4.268.220,00
158	Dispenser	Sanken	Pembelian	2022		Baik	2	7.920.000,00
159	Dispenser	Sanken / 4	Pembelian	2024		Baik	1	3.700.000,00
160	Handy Cam	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	2	17.375.000,00
161	Handy Cam	CMT	Pembelian	2012		Baik	1	7.953.000,00
162	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
163	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
164	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
165	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
166	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
167	Gordyin/Kray	Kain Onyc	Pembelian	2012		Baik	1	7.200.000,00
168	Gordyin/Kray	WARNA COKLAT MUDA POLOS	Pembelian	2015	10 M	Baik	10	3.600.000,00
169	Gordyin/Kray	Custom	Pembelian	2022		Baik	1	31.635.000,00
170	Tangga	Stadex / 8,2 M	Pembelian	2021		Baik	1	7.653.360,00
171	Bracket Standing Peralatan	nort bayou stand bracket NB	Pembelian	2023		Baik	1	2.752.800,00
172	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Krisbow / 18 M2 Cadr 150 M3/jam	Pembelian	2024		Baik	2	4.550.000,00
173	Alat Pemadam/Portable	Fire ACE / FA-55 P	Pembelian	2007	55 Kg	Baik	1	8.100.000,00
174	Generator Busa	BIG POWER / ET7000 LE	Pembelian	2014	KW 2600852	Baik	1	8.750.000,00
175	Meja Kerja Pejabat lain-lain	-	Pembelian	2016		Baik	3	8.856.750,00
176	Kursi Kerja Pejabat lainnya	savello / hidrolik	Pembelian	2020		Baik	10	19.635.000,00
177	Kursi Kerja Pejabat lainnya	inco	Pembelian	2021		Baik	10	18.480.000,00
178	Kursi Kerja Pejabat lainnya	custem	Pembelian	2023		Baik	5	9.157.500,00
179	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	CHITOSE / KURSI LIPAT	Pembelian	2013		Baik	16	5.920.000,00
180	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	BIG TOP / HITAM BUNGA - BUNGA	Pembelian	2015		Baik	1	4.100.000,00
181	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	2 pintu	Pembelian	2011		Baik	1	1.325.000,00
182	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	Pembelian	2001		Rusak Berat	1	500.000,00
183	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	3.000.000,00
184	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	VIP / -	Pembelian	2009	-	Baik	2	7.254.000,00

185	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 pintu	Pembelian	2011		Baik	2	6.000.000,00
186	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Activ	Pembelian	2011		Baik	1	1.325.000,00
187	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pro Design / Besar 4 pintu,4 rak,4 laci	Pembelian	2011		Baik	1	6.000.000,00
188	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	VIP	Pembelian	2012		Baik	1	3.000.000,00
189	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	Pembelian	2016		Baik	3	8.947.125,00
190	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Custom	Pembelian	2022		Baik	2	8.140.000,00
191	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	Pembelian	2015		Baik	3	2.100.000,00
192	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	Pembelian	2016		Baik	3	4.428.375,00
193	Uninterruptible Power Supply (UPS)	- / 1200VA/600W	Pembelian	2020		Baik	3	5.775.000,00
194	peralatan studio audio lainnya (dst)	Nikkon	Pembelian	2012		Baik	1	5.255.000,00
195	peralatan studio audio lainnya (dst)	FUJIFILM FINEPIX 54600 / SN/3WJ07827, SN/3WJ07796, SN/3WG51230	Pembelian	2015		Baik	3	5.865.000,00
196	Camera Electronic	Epson LCD	Pembelian	2012		Baik	1	6.248.000,00
197	Camera Electronic	Canon EOS 60 D + lens 0801108552 / DS126281 / 2881421084	Pembelian	2014		Baik	1	14.350.000,00
198	Camera Electronic	Canon EOS 60 D + lens 0801108554 / DS126281 / 2881421086	Pembelian	2014		Baik	1	14.350.000,00
199	Camera Electronic	Canon EOS 60 D + lens 0801108551 / DS126281 / 2881421087	Pembelian	2014		Baik	1	14.350.000,00
200	Video Monitor	custem	Pembelian	2023		Baik	1	1.480.000.000,00
201	Layar Film/Projector	Toshiba / TDP-S8	Pembelian	2001	Kecil	Kurang Baik	1	6.800.000,00
202	Layar Film/Projector	microvision	Pembelian	2021		Baik	1	5.199.700,00
203	Camera Conference	Logitech Rally Plus	Pembelian	2023		Baik	1	57.165.000,00
204	Telephone (PABX)	Panasonic / KX-TES824	Pembelian	2024		Baik	1	15.350.000,00
205	Pesawat Telephone	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	255.000,00
206	Handy Talky (HT)	Motorola	Pembelian	2012		Baik	3	8.910.000,00
207	Handy Talky (HT)	Hytera	Pembelian	2024		Baik	4	33.200.000,00
208	Handy Talky (HT)	Hytera	Pembelian	2024		Baik	6	49.800.000,00
209	Facsimile	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	1.360.000,00
210	Facsimile	Panasonic / FT-983	Pembelian	2009	-	Baik	1	2.000.000,00
211	Facsimile	PANASONIC / KX - FT 983CX (BLACK)	Pembelian	2015		Baik	1	2.800.000,00
212	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Motorola / M-3688	Pembelian	2019		Baik	1	8.300.000,00
213	Unit Tranceiver FM	Yaesu	Pembelian	2012		Baik	1	4.840.000,00
214	Unit Tranceiver UHF Portable	Yaesu VX-6R / TribandH/L	Pembelian	2020		Baik	3	16.335.000,00
215	alat komunikasi radio uhf lainnya	Weierwei /	Pembelian	2019		Baik	8	8.600.000,00

216	(dst) Wireless Amplifier	UV-V9 Kertz / Aux,tuner,MP3, Mic	Pembelian	2019		Baik	1	6.600.000,00
217	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Sony Recorder	Pembelian	2012		Baik	1	1.650.000,00
218	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Sony Voice Recorder	Pembelian	2012		Baik	2	3.300.000,00
219	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	Dji Mavic 2 / dual Thermal	Pembelian	2021		Baik	1	54.175.000,00
220	Antene UHF Stationary	Base Station / HyGain	Pembelian	2019		Baik	1	950.000,00
221	Alat Kedokteran umum lainnya	Ynwell / Infrared Digital	Pembelian	2020		Baik	1	1.500.000,00
222	Bracket Holder	samsung	Pembelian	2023		Baik	1	1.942.500,00
223	Alat Pemanas	Kris chef	Pembelian	2023		Baik	1	2.553.000,00
224	Personal Computer	DELL / Intel core i3 Processor 1215U	Pembelian	2022		Baik	1	13.800.630,00
225	Personal Computer	Asusu / pc desktop	Pembelian	2024		Baik	3	53.700.000,00
226	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	-	Pembelian	2000		Rusak Berat	1	200.000,00
227	recorder display lainnya (dst)	epson / i565	Pembelian	2018		Baik	3	16.335.000,00
228	Kamera Digital	Weierwei UV-V9 Tri Band	Pembelian	2023		Baik	1	16.983.000,00
229	Mainframe (Komputer Jaringan)	HP MODEL : PROLIANT ML 350P GEN 8 SERVER, MONITOR / S/N 508037-371	Pembelian	2015		Baik	1	40.350.000,00
230	P.C Unit	-	Pembelian	2000		Rusak Berat	1	5.185.000,00
231	P.C Unit	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	2	10.370.000,00
232	P.C Unit	PC Asus	Pembelian	2012		Baik	1	5.500.000,00
233	P.C Unit	HP	Pembelian	2012		Baik	1	6.600.000,00
234	P.C Unit	-	Pembelian	2012		Baik	1	5.000.000,00
235	P.C Unit	Monitor LED LG + CPU Power WSB / Monitor 49cm 20M35	Pembelian	2014		Baik	2	14.400.000,00
236	P.C Unit	Monitor LG, CPU Sun Bio / Seri : 312NDUNGV58 2	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00
237	P.C Unit	Monitor LG, CPU Sun Bio / Seri : 309/NDLWGV5 11	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00
238	P.C Unit	Monitor LG, CPU Sun Bio / Seri : 309/NDLSGV49 6	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00
239	P.C Unit	Monitor LG, CPU Sun Bio / Seri : 312NDUNGV58 2	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00
240	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00

241	P.C Unit	BTXE39A00017 0 MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00010 8	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
242	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00230 2	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
243	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00010 9	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
244	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00185 6	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
245	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00124 3	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
246	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00030 5	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
247	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00088 0	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
248	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00101 6	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
249	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00011 9	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
250	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00099 8	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
251	P.C Unit	PC. COMPUTER (RAKITAN) MONITOR LG MODEL : 20M37 / S/N 503NDQA4P74 0	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
252	P.C Unit	PC. COMPUTER (RAKITAN) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NDQAHL01	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
253	P.C Unit	PC. MONITOR (RAKITAN)	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00

254	P.C Unit	MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503ND2JHL085 PC. COMPUTER (RAKITAN) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NDMTHL04 3	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
255	P.C Unit	PC.COMPUTER (RAKITAN) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NOZJHL061	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
256	P.C Unit	PC.COMPUTER (RAKITAN) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NDPHL00 8	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
257	P.C Unit	hp / desktop all in one	Pembelian	2020		Baik	1	9.900.000,00
258	P.C Unit	Asus / type 1	Pembelian	2022		Baik	1	12.760.000,00
259	P.C Unit	Asus	Pembelian	2023		Baik	1	16.761.000,00
260	Lap Top	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	2	34.000.000,00
261	Lap Top	Acer / Aspire 4920	Pembelian	2008	14 inch	Baik	1	10.000.000,00
262	Lap Top	Toshiba / Satellite L-310	Pembelian	2009	14 inch	Baik	2	16.600.000,00
263	Lap Top	Toshiba / Satellite L-310	Pembelian	2009	14 inch	Baik	1	8.300.000,00
264	Lap Top	Toshiba / Satellite L-310	Pembelian	2009	14 inch	Baik	1	8.300.000,00
265	Lap Top	ASUS (Warna Merah) / A450/D7N0CX4 54255309 monitor 14"	Pembelian	2014		Baik	2	17.600.000,00
266	Lap Top	TOSHIBA / L855/2D01487 8Q	Pembelian	2014		Rusak Berat	1	8.800.000,00
267	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D09837 4Q	Pembelian	2014		Baik	1	8.800.000,00
268	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D09745 6Q	Pembelian	2014		Baik	1	8.800.000,00
269	Lap Top	TOSHIBA / L855/2D13883 2Q	Pembelian	2014		Rusak Berat	1	8.800.000,00
270	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D47973 3Q	Pembelian	2014		Rusak Berat	1	8.800.000,00
271	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D47916 9Q	Pembelian	2014		Baik	1	8.800.000,00
272	Lap Top	TOSHIBA / L855/2D13905 1Q	Pembelian	2014		Rusak Berat	1	8.800.000,00
273	Lap Top	TOSHIBA / L855/2D14050 4Q	Pembelian	2014		Rusak Berat	1	8.800.000,00

274	Lap Top	ASUS A455L / S/N ECNOWU00578 3498	Pembelian	2015		Baik	1	12.200.000,00
275	Lap Top	ASUS A455L / S/N EBNOWU35031 9489	Pembelian	2015		Baik	1	12.200.000,00
276	Lap Top	ASUS A455L / S/N EBNOWU34161 2484	Pembelian	2015		Baik	1	12.200.000,00
277	Lap Top	asus	Pembelian	2018		Baik	8	72.842.000,00
278	Lap Top	ASUS / A407UF	Pembelian	2019		Baik	1	12.500.000,00
279	Lap Top	Dell	Pembelian	2020		Baik	1	13.970.000,00
280	Lap Top	HP/silver / intel core i7	Pembelian	2021		Baik	2	30.690.000,00
281	Lap Top	Lenovo / legion 5 151AH7	Pembelian	2022		Baik	1	31.968.000,00
282	Lap Top	Lenovo / window 11 home 64 single language	Pembelian	2022		Baik	1	29.492.700,00
283	Lap Top	acer	Pembelian	2023		Baik	2	37.262.700,00
284	Lap Top	HP	Pembelian	2023		Baik	3	55.611.000,00
285	Lap Top	lenovo / windows 11	Pembelian	2023		Baik	1	16.539.000,00
286	Lap Top	lenovo / windows 11	Pembelian	2023		Baik	1	16.539.000,00
287	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB02951288	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
288	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB0323629	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
289	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB03269901	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
290	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB02955314	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
291	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB02951233	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
292	Tablet PC	Samsung Galaxy / android OS 12	Pembelian	2022		Baik	2	29.998.860,00
293	Tablet PC	Samsung / Galaxy Note S-8, ram 8Gb-internal 128 GB	Pembelian	2022		Baik	3	53.912.700,00

294	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S9 5G	Pembelian	2023		Baik	2	36.885.300,00
295	Personal Komputer lainnya	dell / Black / all in one	Pembelian	2021		Baik	5	54.450.000,00
296	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	brother ADS-1700W / wifi usb cloud	Pembelian	2020		Baik	1	6.380.000,00
297	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	DELL	Pembelian	2011		Baik	1	400.000,00
298	CPU (Peralatan Personal Komputer)	DELL	Pembelian	2011		Baik	1	4.000.000,00
299	Monitor	DELL	Pembelian	2011		Baik	1	3.000.000,00
300	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	1	800.000,00
301	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Deskjet F2100 Series	Pembelian	2007	Sedang	Baik	1	1.500.000,00
302	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LX-300+II	Pembelian	2009	-	Rusak Berat	1	300.000,00
303	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / LQ 2190	Pembelian	2011		Rusak Berat	1	3.000.000,00
304	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MP258	Pembelian	2011	-	Rusak Berat	1	1.500.000,00
305	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MP258	Pembelian	2011	-	Rusak Berat	1	1.500.000,00
306	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma MP258	Pembelian	2011	-	Rusak Berat	1	1.500.000,00
307	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP287	Pembelian	2012		Rusak Berat	1	1.243.000,00
308	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / MP 237	Pembelian	2013		Baik	2	2.180.000,00
309	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / L550 / Seri *SARY004879	Pembelian	2014		Baik	1	4.500.000,00
310	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 / SERI RAEK133467	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
311	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 / seri : RAEK132853	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
312	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 / SERI : RAEK127666	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
313	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON 210 / Model C462H / RAEK137238	Pembelian	2014		Baik	1	2.675.909,00
314	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet / Type 400	Pembelian	2015		Baik	2	10.100.000,00
315	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770/QC3-50 62 / CODE : QC3-2772-DB0 1-01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
316	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3-2772-DB0 1-02	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
317	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3-2772-DB0 1-01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
318	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3-2772-DB0 1-01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
319	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON TYPE :	Pembelian	2015		Baik	1	4.370.000,00

	Komputer)	L555 / S/N U5WY004969						
320	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3 - 2772 - DB01 -01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
321	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3 - 2772 - DB01 -01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
322	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON TYPE : L555 / S/N U5WY004955	Pembelian	2015		Rusak Berat	1	4.370.000,00
323	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON TYPE : L555 / S/N U5Y004816	Pembelian	2015		Baik	1	4.370.000,00
324	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet / Type 40	Pembelian	2015		Baik	1	5.050.000,00
325	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L555	Pembelian	2015	S/N U5WY004254	Baik	1	4.650.000,00
326	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L555	Pembelian	2015	S/N U5WY004639	Baik	1	4.650.000,00
327	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L565	Pembelian	2019		Baik	1	5.300.000,00
328	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson LQ-2190 / dot matrix	Pembelian	2020		Baik	1	7.590.000,00
329	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson/l 6190 / mesin cetak multifungsi berwarna injet	Pembelian	2021		Baik	6	35.640.000,00
330	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2022		Baik	1	4.675.000,00
331	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / L5290	Pembelian	2022		Baik	1	6.987.450,00
332	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hewlett Packard (HP) / Color Laser Jet Pro MFP M182n	Pembelian	2022		Baik	1	14.973.900,00
333	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	3	22.803.840,00
334	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / l6270	Pembelian	2023		Baik	3	21.645.000,00
335	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	1	8.602.500,00
336	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	1	7.100.670,00
337	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson workforce / wireless A4 duplex	Pembelian	2024		Baik	1	7.300.000,00
338	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	plustek	Pembelian	2022		Baik	1	9.130.000,00
339	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	czur	Pembelian	2023		Baik	1	10.878.000,00
340	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	1	6.504.600,00
341	External/ Portable Hardisk	adata/durable black / auto backup , kompatibel usb 2.0	Pembelian	2021		Baik	1	2.475.000,00
342	External/ Portable Hardisk	Toshiba	Pembelian	2022		Baik	1	900.000,00
343	External/ Portable Hardisk	SanDisk Ultra 1 Tera byte	Pembelian	2024		Baik	10	17.900.000,00
344	Peralatan Personal Komputer lainnya	UPC / UPS BATTERY	Pembelian	2011		Baik	1	2.000.000,00

345	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	Pembelian	2016		Baik	6	10.664.250,00
346	Peralatan Personal Komputer lainnya	Western Digital	Pembelian	2019		Baik	1	2.100.000,00
		/ Expansion Data						
347	Peralatan Personal Komputer lainnya	Seagate /	Pembelian	2019		Baik	1	1.500.000,00
		Survelance						
348	Peralatan Jaringan lainnya	D-Link / Ultra Wireless HD 4K	Pembelian	2019		Baik	1	5.850.000,00
349	Air Conditioning (AC)	Panasonic	Pembelian	2023		Baik	1	5.217.000,00
350	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Pembelian	2006	187	Baik	1	678.021.323,00
351	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Pembelian	2006	108	Kurang Baik	1	103.083.000,00
352	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	-	Pembelian	2006	65	Kurang Baik	1	32.500.000,00
353	Gedung Pos Jaga Permanen	-	Pembelian	2006	12	Baik	1	16.200.000,00
354	Bangunan Tempat Parkir	-	Pembelian	2024	343.57	Baik	1	229.316.903,55
355	Taman lainnya	-	Pembelian	2012		Baik	1	4.000.000,00
356	Pagar Permanen	-	Pembelian	2023		Baik	1	49.395.000,00
357	Jaringan Distribusi Lain-lain	-	Pembelian	2019	0	Baik	1	3.253.700,00
358	Buku Umum Lain-lain	-	Pembelian	2011		Baik	4	5.000.000,00

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Saat Ini

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam periode perencanaan sebelumnya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan. Kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama maupun kinerja program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan		60	63	65	68	70	60,46	63,92	65,96			
2.	Presentase Partisipasi Lembaga Politik		67 %	80 %	100 %	67 %	67 %	67 %	80 %	100 %			

	Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat												
3.	Presetase Konflik Sosial Yang Tertangani		80 %	83 %	88%	88 %	89 %	81 %	85 %	85 %			

Dari capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 4 tahun yaitu tahun 2022 sampai dengan 2025 dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dapat terlihat bahwa tingkat capaian untuk indikator kinerja utama sebagai berikut:

- 1) Nilai SAKIP yang diperoleh selama tahun 2025-2029 telah mencapai target, adapun nilai yang sudah mencapai target tersebut perlu dilakukan peningkatan pada capaian periode berikutnya untuk mendapatkan kategori BB (sangat baik) sehingga perlu dilakukan tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim reviu AKIP untuk meningkatkan nilai AKIP yang diperoleh di periode mendatang;
- 2) Indikator kedua telah memiliki capaian kinerja yang mencapai target kinerja pada tahun 2024, diharapkan target tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2025 dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada partai politik untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi partai politik penerima bantuan keuangan dalam melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat;
- 3) Indikator ketiga pada tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Langkah yang dilakukan pada periode selanjutnya adalah meningkatkan responsivitas dan efektivitas Badan Kesbangpol dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan konflik sosial.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menghadapi sejumlah permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

Pemetaan Masalah		
Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah / Akar Masalah

Belum optimalnya kondusivitas daerah	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat
	Masih adanya egosentris kesukuan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial	Adanya keberagaman sebagai dampak dari heterogenitas Kota Balikpapan
	Kebutuhan bahan pokok masih bergantung dengan daerah lain	Kota Balikpapan bukan daerah penghasil bahan pokok makanan
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan trantibum dan potensi munculnya konflik sosial	Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN menjadi daya tarik
		Proyek-proyek strategis nasional yang ada Kota Balikpapan
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada
		Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap calon yang akan dipilih
		Kurangnya minat perempuan dalam dunia politik
	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)	Netralitas ASN
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
		Rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif untuk menyuarkan hak perempuan
		Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik

	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah	Rendahnya pemahaman Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
		Belum ada regulasi daerah yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan
	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

2. Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi internal dan eksternal, serta tantangan pembangunan kedepan, isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan meliputi:

Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sinergitas dengan instansi pendukung keamanan dan kondusivitas wilayah di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat	Dampak bangkitan pembangunan IKN	Mobilitas masyarakat internasional terkait dengan pembangunan IKN	Pembangunan IKN terhadap kondusivitas wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN	Kemunculan perkumpulan atau organisasi masyarakat yang tidak terdaftar ataupun tidak sesuai dengan ideologi bangsa	Penguatan kondusivitas dan stabilitas wilayah
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan transtibum dan potensi munculnya konflik sosial		Tuntutan global terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.	Meningkatnya jumlah ormas yang tidak terdaftar atau menyimpang dari tujuan awal pendiriannya.		
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih					

	dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada					
	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					
	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah					
	Potensi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat dari aksi premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					

	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan				
--	---	--	--	--	--

1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menghadapi sejumlah permasalahan sebagai berikut :

a. Bidang Kesatuan Bangsa

Permasalahan :

- 1) Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Belum optimalnya internalisasi nilai wawasan kebangsaan di kalangan pelajar, generasi muda, dan kelompok masyarakat marjinal;
- 3) Kurangnya forum komunikasi kebangsaan lintas etnis, agama, dan golongan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatnya potensi gesekan sosial akibat perbedaan identitas, kepentingan ekonomi, dan politik lokal;
- 5) Masih terdapat konflik sosial yang belum tertangani secara tuntas;
- 6) Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial;
- 7) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendukung ketahanan ideologi negara;
- 8) Meningkatnya potensi penyebaran paham intoleransi dan radikalisme berbasis media sosial.

b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan partai politik;
- 2) Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan demokrasi non-pemilu;
- 3) Masih terdapat ormas yang belum tertib administrasi dan belum terdaftar secara resmi.

Isu Strategis

Dari permasalahan di atas baik yang bersifat multisektor maupun sektoral menjadi bahan lebih lanjut dalam perumusan isu strategis melalui pertimbangan urgensi (urgency), kepentingan (seriousness), dan pertumbuhan (growth). Isu strategis dalam isu penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Simpulan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Balikpapan

Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sinergitas dengan instansi pendukung keamanan dan kondusivitas wilayah di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat	Dampak bangkitan pembangunan IKN	Mobilitas masyarakat internasional terkait dengan pembangunan IKN	Pembangunan IKN terhadap kondusivitas wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN	Kemunculan perkumpulan atau organisasi masyarakat yang tidak terdaftar ataupun tidak sesuai dengan ideologi bangsa	Penguatan kondusivitas dan stabilitas wilayah
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan trantibum dan potensi munculnya konflik sosial		Tuntutan global terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.	Meningkatnya jumlah ormas yang tidak terdaftar atau menyimpang dari tujuan awal pendiriannya.		
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada					

	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					
	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah					
	Potensi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat dari aksi premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					
	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan					

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

3.1 Tujuan

Dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menetapkan satu tujuan utama perangkat daerah, yaitu :

Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis.

Tujuan ini menggambarkan kondisi masyarakat Kota Balikpapan yang hidup dalam suasana damai, saling menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Kehidupan yang harmonis merupakan pondasi bagi stabilitas daerah, keamanan, dan kelancaran Pembangunan. Badan Kesbangpol Kota Balikpapan berperan untuk menjaga kondusifitas di Kota Balikpapan.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam Tabel berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
- Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis		Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk) (Angka)	0,6	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	
		Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah Diselesaikan (%)	79	80	80	82	84	86	89	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60,46	65,96	66,5	67,4	68,3	69,2	70,1	

3.3 Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/ Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut tahapan Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan selama periode 2025-2029:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi kepada ormas, LSM dan partai politik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Mempersiapkan pemilih pemula dalam mengikuti Pemilu/Pilkada	Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih operasional. Adapun arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan	Penguatan pengawasan terhadap parpol, LSM, dan Ormas Pembinaan kepada organisasi	

	kemasyarakatan Pembinaan ideologi pancasila	
	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada ormas-ormas kedaerah dan masyarakat secara keseluruhan untuk membangun kesadaran wawasan kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika	

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan selama periode renstra di atas. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan.

Berikut adalah Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan:

I. 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) 8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) 8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. 8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) 8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) 8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
3. 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) 8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) 8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) 8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) 8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) 8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 6) 8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) 8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) 8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) 8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel;
- 4) 8.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) 8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) 8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) 8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) 8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) 8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) 8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - 5) 8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 6) 8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) 8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - 2) 8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - 3) 8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - 4) 8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - 5) 8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
 - 6) 8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka;
 - 7) 8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila.

III. 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) 8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - 2) 8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - 3) 8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - 4) 8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

IV. 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) 8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - 2) 8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - 3) 8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - 4) 8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

V. 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) 8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

- 2) 8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- 3) 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- 4) 8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

VI. 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. 8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) 8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - 2) 8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - 3) 8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - 4) 8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - 5) 8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pagu Indikatif merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan, hingga sub-kegiatan. Pagu Indikatif ini berfungsi sebagai batas estimasi anggaran yang akan menjadi acuan penting bagi kita semua dalam merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan, agar dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan selama periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut ini.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				37.335.59 9.000		38.455.66 7.000		40.378.45 0.000		41.186.01 9.000		42.421.60 0.000		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A				10.296.15 9.091		11.419.67 3.815		11.953.45 6.815		12.347.02 5.815		12.526.87 7.710		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	80,2	80,5	10.296.15 9.091	81	11.419.67 3.815	81,25	11.953.45 6.815	81,5	12.347.02 5.815	82	12.526.87 7.710	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.014.70 0		45.674.70 0		48.040.00 0		48.040.00 0		60.000.00 0		
Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur, dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	46.014.70 0	1	45.674.70 0	1	48.040.00 0	1	48.040.00 0	1	60.000.00 0		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.634.700		7.634.700		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	7.634.700	1	7.634.700	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				38.380.00 0		38.040.00 0		38.040.00 0		38.040.00 0		50.000.00 0		

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4	38.380.00 0	4	38.040.00 0	4	38.040.00 0	4	38.040.00 0	4	50.000.00 0		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.482.849. 000		6.380.000. 000		6.677.754. 935		6.897.932. 145		7.018.815. 830		
Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	25	5.482.849. 000	26	6.380.000. 000	28	6.677.754. 935	28	6.897.932. 145	28	7.018.815. 830		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.482.849. 000		6.380.000. 000		6.677.754. 935		6.897.932. 145		7.018.815. 830		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	25	5.482.849. 000	26	6.380.000. 000	28	6.677.754. 935	28	6.897.932. 145	28	7.018.815. 830		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.0 00		406.000.0 00		432.000.0 00		470.000.0 00		485.000.0 00		

Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	350.000.000	2	406.000.000	2	432.000.000	2	470.000.000	2	485.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25		25		26		26		26			
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		56.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	0	2	56.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				350.000.000		350.000.000		362.000.000		400.000.000		415.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25	350.000.000	25	350.000.000	26	362.000.000	26	400.000.000	26	415.000.000		

8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.212.633. 766		1.245.906. 405		1.373.906. 405		1.433.906. 405		1.504.906. 405		
Laporan pelaksanaan admistrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara aktif dan efisien	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1.212.633. 766	1	1.245.906. 405	1	1.373.906. 405	1	1.433.906. 405	1	1.504.906. 405		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	14	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	9		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	30		33		35		37		40			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	3		5		7		6		6			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	24		24		24		24		24			

8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				249.823.3 50		260.000.0 00		350.000.0 00		350.000.0 00		350.000.0 00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	3	249.823.3 50	5	260.000.0 00	7	350.000.0 00	6	350.000.0 00	6	350.000.0 00		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				440.367.9 05		450.367.9 05		470.367.9 05		484.367.9 05		507.367.9 05		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	9	440.367.9 05	8	450.367.9 05	8	470.367.9 05	8	484.367.9 05	8	507.367.9 05		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				59.909.96 1		60.000.00 0		65.000.00 0		65.000.00 0		65.000.00 0		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	59.909.96 1	1	60.000.00 0	1	65.000.00 0	1	65.000.00 0	1	65.000.00 0		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.538.50 0		15.538.50 0		18.538.50 0		19.538.50 0		22.538.50 0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	36	24	12.538.50 0	24	15.538.50 0	24	18.538.50 0	24	19.538.50 0	24	22.538.50 0		

	Disediakan (Dokumen)													
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				49.994.05 0		50.000.00 0		50.000.00 0		55.000.00 0		60.000.00 0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	14	10	49.994.05 0	10	50.000.00 0	10	50.000.00 0	10	55.000.00 0	10	60.000.00 0		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.0 00		410.000.0 00		420.000.0 00		460.000.0 00		500.000.0 00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	30	400.000.0 00	33	410.000.0 00	35	420.000.0 00	37	460.000.0 00	40	500.000.0 00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				821.735.8 20		651.735.8 20		467.600.0 00		605.600.0 00		515.000.0 00		
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	5	821.735.8 20	4	651.735.8 20	2	467.600.0 00	2	605.600.0 00	3	515.000.0 00		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			

	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0		2		0		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				237.600.000		247.600.000		267.600.000		280.600.000		290.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	237.600.000	1	247.600.000	1	267.600.000	1	280.600.000	1	290.000.000		
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		60.000.000		0		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	0	2	60.000.000	0	0	2	75.000.000	2	75.000.000		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				344.135.820		344.135.820		200.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	5	344.135.8 20	4	344.135.8 20	2	200.000.0 00	2	150.000.0 00	3	150.000.0 00		
8.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		100.000.0 00		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.0 00	0	0		
8.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				240.000.0 00		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	240.000.0 00	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.318.219. 055		1.332.000. 000		1.361.219. 055		1.423.219. 055		1.446.219. 055		
Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawab an penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	1.318.219. 055	5	1.332.000. 000	5	1.361.219. 055	5	1.423.219. 055	5	1.446.219. 055		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			

8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				290.385.8 55		300.000.0 00		300.385.8 55		350.385.8 55		355.385.8 55		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	290.385.8 55	36	300.000.0 00	36	300.385.8 55	36	350.385.8 55	36	355.385.8 55		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.027.833. 200		1.032.000. 000		1.060.833. 200		1.072.833. 200		1.090.833. 200		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	1.027.833. 200	5	1.032.000. 000	5	1.060.833. 200	5	1.072.833. 200	5	1.090.833. 200		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.064.706. 750		1.358.356. 890		1.592.936. 420		1.468.328. 210		1.496.936. 420		
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin berkala	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	1.064.706. 750	0	1.358.356. 890	2	1.592.936. 420	2	1.468.328. 210	2	1.496.936. 420		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0		0		1		0		0			

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	21		21		21		21		21			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	61	125		125		128		128		128			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				565.888.680		578.888.680		575.888.680		587.860.000		591.888.680		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	19	21	565.888.680	21	578.888.680	21	575.888.680	21	587.860.000	21	591.888.680		

	dibayarkan Pajaknya (Unit)													
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		10.000.00 0		15.000.00 0		15.000.00 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	2	10.000.00 0	2	15.000.00 0	2	15.000.00 0		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				365.238.5 40		375.888.6 80		395.888.6 80		394.888.6 80		398.888.6 80		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	61	125	365.238.5 40	125	375.888.6 80	128	395.888.6 80	128	394.888.6 80	128	398.888.6 80		
8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		60.000.00 0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0	1	60.000.00 0	0	0	0	0		

8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		200.000.0 00		250.579.5 30		220.579.5 30		240.579.5 30		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	1	0	0	1	200.000.0 00	1	250.579.5 30	1	220.579.5 30	1	240.579.5 30		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				133.579.5 30		203.579.5 30		300.579.5 30		250.000.0 00		250.579.5 30		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	1	1	133.579.5 30	1	203.579.5 30	1	300.579.5 30	1	250.000.0 00	1	250.579.5 30		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				8.063.048. 810		7.868.733. 136		8.058.733. 136		8.118.733. 136		8.189.733. 136		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	64	75	8.063.048. 810	79	7.868.733. 136	80	8.058.733. 136	85	8.118.733. 136	90	8.189.733. 136	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				8.063.048. 810		7.868.733. 136		8.058.733. 136		8.118.733. 136		8.189.733. 136		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan terhadap masyarakat	Jumlah Paskibraka (Orang)	43	43	8.063.048. 810	43	7.868.733. 136	43	8.058.733. 136	43	8.118.733. 136	43	8.189.733. 136		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	300	300		350		350		350		350			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	4	0		0		1		1		1			

	Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)													
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	2.050		1.000		1.050		1.100		1.150			
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang	2	1		1		1		1		1			

	Disusun (Dokumen)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	40	43		43		43		43		43			
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal				949.991.6 30		755.000.0 00		765.000.0 00		770.000.0 00		770.000.0 00		

Ika dan Sejarah Kebangsaan														
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	2	1	949.991.6 30	1	755.000.0 00	1	765.000.0 00	1	770.000.0 00	1	770.000.0 00		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.040.000. 000		1.050.000. 000		1.055.000. 000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	40	43	1.000.000.000	43	1.000.000.000	43	1.040.000.000	43	1.050.000.000	43	1.055.000.000		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		515.000.000		535.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	300	300	500.000.000	350	500.000.000	350	500.000.000	350	515.000.000	350	535.000.000		

8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	4	0	0	0	0	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek				1.500.000.000		1.500.000.000		1.520.000.000		1.520.000.000		1.530.000.000		

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	2.050	1.500.000.000	1.000	1.500.000.000	1.050	1.520.000.000	1.100	1.520.000.000	1.150	1.530.000.000		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				3.603.057.180		3.603.733.136		3.633.733.136		3.653.733.136		3.659.733.136		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	43	43	3.603.057.180	43	3.603.733.136	43	3.633.733.136	43	3.653.733.136	43	3.659.733.136		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				510.000.000		510.000.000		530.000.000		530.000.000		550.000.000		

Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	510.000.000	1	510.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000	1	550.000.000		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				6.846.698.920		9.131.567.870		9.431.567.870		9.586.567.870		10.001.567.870		
Meningkatnya peran Partai Politik dalam peningkatan kehidupan demokrasi	Persentase Partai Politik yang aktif melaksanakan Pendidikan Politik kepada masyarakat (%)	100	100	6.846.698.920	100	9.131.567.870	100	9.431.567.870	100	9.586.567.870	100	10.001.567.870	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala				6.846.698.920		9.131.567.870		9.431.567.870		9.586.567.870		10.001.567.870		

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
Terlaksananya etika dan budaya politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1	6.846.698.920	1	9.131.567.870	1	9.431.567.870	1	9.586.567.870	1	10.001.567.870		

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	150		150		170		200		220			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	100		150		200		300		350			

	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4.211.194. 420		6.485.063. 370		6.535.063. 370		6.540.063. 370		6.590.063. 370		

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	1	4.211.194.420	1	6.485.063.370	1	6.535.063.370	1	6.540.063.370	1	6.590.063.370		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				717.566.000		728.566.000		828.566.000		928.566.000		978.566.000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	100	717.566.000	150	728.566.000	200	828.566.000	300	928.566.000	350	978.566.000		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				268.500.000		268.500.000		318.500.000		323.500.000		523.500.000		

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	150	268.500.000	150	268.500.000	170	318.500.000	200	323.500.000	220	523.500.000		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.649.438.500		1.649.438.500		1.749.438.500		1.794.438.500		1.909.438.500		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1	1.649.438.500	1	1.649.438.500	1	1.749.438.500	1	1.794.438.500	1	1.909.438.500		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.306.355.115		2.306.355.115		2.496.355.115		2.529.355.115		2.672.084.220		
Meningkatnya keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah (%)	39	60	2.306.355.115	65	2.306.355.115	70	2.496.355.115	75	2.529.355.115	80	2.672.084.220	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2.306.355. 115		2.306.355. 115		2.496.355. 115		2.529.355. 115		2.672.084. 220		
Terlaksananya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100	150	2.306.355. 115	150	2.306.355. 115	200	2.496.355. 115	220	2.529.355. 115	220	2.672.084. 220		
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	300		350		375		400		425			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan				338.711.1 65		338.711.1 65		338.711.1 65		343.711.1 65		386.440.2 70		

Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	338.711.165	1	338.711.165	1	338.711.165	1	343.711.165	1	386.440.270		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.163.775.000		1.163.775.000		1.213.775.000		1.218.775.000		1.238.775.000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	300	1.163.775.000	350	1.163.775.000	375	1.213.775.000	400	1.218.775.000	425	1.238.775.000		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				290.200.000		290.200.000		330.200.000		348.200.000		348.200.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100	150	290.200.000	150	290.200.000	200	330.200.000	220	348.200.000	220	348.200.000		

8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				513.668.9 50		513.668.9 50		613.668.9 50		618.668.9 50		698.668.9 50		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1	513.668.9 50	1	513.668.9 50	1	613.668.9 50	1	618.668.9 50	1	698.668.9 50		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				2.408.759. 100		1.710.759. 100		1.860.759. 100		1.935.759. 100		2.035.759. 100		

Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	2.408.759. 100	100	1.710.759. 100	100	1.860.759. 100	100	1.935.759. 100	100	2.035.759. 100	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				2.408.759. 100		1.710.759. 100		1.860.759. 100		1.935.759. 100		2.035.759. 100		
Terlaksananya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	48	48	2.408.759. 100	12	1.710.759. 100	12	1.860.759. 100	12	1.935.759. 100	12	2.035.759. 100		

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	400	400		400		450		450		450			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	250	300		300		310		310		320			

	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.245.059. 100		545.059.1 00		545.059.1 00		550.059.1 00		550.059.1 00		

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.245.059.100	1	545.059.100	1	545.059.100	1	550.059.100	1	550.059.100		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500.000.000		500.000.000		650.000.000		655.000.000		655.000.000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	400	400	500.000.000	400	500.000.000	450	650.000.000	450	655.000.000	450	655.000.000		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				263.700.000		265.700.000		265.700.000		325.700.000		325.700.000		

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	250	300	263.700.000	300	265.700.000	310	265.700.000	310	325.700.000	320	325.700.000		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		405.000.000		505.000.000		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	48	48	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	405.000.000	12	505.000.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				7.414.577.964		6.018.577.964		6.577.577.964		6.668.577.964		6.995.577.964		
Meningkatnya kualitas penanganan potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani (%)	100	100	7.414.577.964	100	6.018.577.964	100	6.577.577.964	100	6.668.577.964	100	6.995.577.964	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				7.414.577.964		6.018.577.964		6.577.577.964		6.668.577.964		6.995.577.964		

Terlaksanannya Penanganan Konflik sosial Yang Diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40	7.414.577.964	40	6.018.577.964	40	6.577.577.964	40	6.668.577.964	40	6.995.577.964		
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1		1		1		1		1			

	yang Disusun (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	24	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	36	36		36		36		36		36			

	Konflik di Daerah (Laporan)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40		40		40		40		40		

8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3.782.499. 995		2.382.499. 995		2.382.499. 995		2.387.499. 995		2.387.499. 995		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	3.782.499. 995	1	2.382.499. 995	1	2.382.499. 995	1	2.387.499. 995	1	2.387.499. 995		

8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.183.085. 809		1.185.085. 809		1.194.085. 809		1.200.085. 809		1.262.085. 809		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40	1.183.085. 809	40	1.185.085. 809	40	1.194.085. 809	40	1.200.085. 809	40	1.262.085. 809		

8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				349.499.9 10		351.499.9 10		501.499.9 10		506.499.9 10		546.499.9 10		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40	349.499.9 10	40	351.499.9 10	40	501.499.9 10	40	506.499.9 10	40	546.499.9 10		

8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				349.492.2 50		349.492.2 50		349.492.2 50		424.492.2 50		449.492.2 50		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	36	36	349.492.2 50	36	349.492.2 50	36	349.492.2 50	36	424.492.2 50	36	449.492.2 50		

	Konflik di Daerah (Laporan)													
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.750.000. 000		1.750.000. 000		2.150.000. 000		2.150.000. 000		2.350.000. 000		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	24	36	1.750.000. 000	36	1.750.000. 000	36	2.150.000. 000	36	2.150.000. 000	36	2.350.000. 000		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	

			Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
2.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya peran Partai Politik dalam peningkatan kehidupan demokrasi	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	

			Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

			8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
3.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	

			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kualitas penanganan potensi konflik sosial	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	

				Penanganan Konflik di Daerah	
				8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
--	--	--	--	--

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

N O	INDIKAT OR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	Angka	0,6	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	Indikator Tujuan PD
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,46	65,96	66,5	67,4	68,3	69,2	70,1	Indikator Sasaran PD
4.	Persentase Potensi Konflik	%	79	80	80	82	84	86	89	Indikator Sasaran PD

	Sosial yang telah Diselesaikan									
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan atau kebijakan publik. IKK membantu dalam:

- 1) **Mengukur capaian program dan kegiatan:** Seberapa jauh program-program yang telah direncanakan (misalnya pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, atau pendidikan) berhasil dilaksanakan dan mencapai targetnya.
- 2) **Mengevaluasi kinerja birokrasi:** Seberapa efisien dan efektif aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3) **Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti:** Data dari IKK menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan terarah, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- 4) **Meningkatkan akuntabilitas publik:** Dengan adanya IKK, masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri kinerja pemerintah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

IKK dengan IKU merupakan hal yang berbeda. IKU cenderung fokus pada hasil akhir (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang lebih luas, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau tingkat kemiskinan. Sementara itu, IKK lebih fokus pada proses, *output*, dan efisiensi kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut.

Berikut ini disajikan tabel IKK dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	negatif	Angka	0,6	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	Indikator Tujuan PD
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	60,46	65,96	66,5	67,4	68,3	69,2	70,1	Indikator Sasaran PD
4.	Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah Diselesaikan	positif	%	79	80	80	82	84	86	89	Indikator Sasaran PD

5.	Persentase masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	positif	%	64	66	75	79	80	85	90	Indikator Program PD
6.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	positif	%	39	46	60	65	70	75	80	Indikator Program PD
7.	Persentase Partai Politik yang aktif melaksanakan Pendidikan Politik kepada masyarakat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
8.	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	80,2	86	80,5	81	81,25	81,5	82	Indikator Program PD
10.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program PD
11.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	negatif	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	Indikator SDG's

BAB 5

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah.

Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra memerlukan komitmen seluruh jajaran aparatur serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan masyarakat Kota Balikpapan yang harmonis, toleran, dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai acuan perencanaan, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar pencapaian tujuan dan sasaran dapat terukur, efektif, dan akuntabel.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra harus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran;
2. Sinkronisasi dan integrasi kebijakan. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana harus digunakan secara optimal untuk mendukung hasil yang nyata dan berkelanjutan;
4. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Pelaksanaan Renstra perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga keagamaan, akademisi, dan dunia usaha dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan sosial;
5. Transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaporan pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dievaluasi untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan implementasi Renstra berjalan sesuai arah yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat prioritas kegiatan dan target kinerja sesuai tahapan pencapaian sasaran strategis;
2. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) secara terukur dan realistis untuk memantau perkembangan capaian hasil;

3. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya, termasuk kebutuhan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem informasi kinerja;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik internal maupun lintas perangkat daerah, guna memastikan sinkronisasi capaian antar program;
5. Penyempurnaan dan revisi Renstra apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, daerah, atau dinamika sosial politik yang signifikan.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang rukun, demokratis, dan berdaya saing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Balikpapan, September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Balikpapan



SUTADI